

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Artadi, I Ketut. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2019)
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010)
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Chaila Indonesia, 1984)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Terjemahan: Somardi. (Bandung: Rimdi Press, 2011)
- _____, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Chaila Indonesia, 1983)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Chaila Indonesia, 1974)
- Puryatma, Pieter I Made. *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*, (Denpasar: 2016)
- Rahardjo, S, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Retnowulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)

Safira, Martha E, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017)

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

_____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979)

_____ dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)

Syahrani, H. Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Utami, Titik, *Pertanggungjawaban Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Melaksanakan Jabatannya dalam Pembuatan Akta*, (Depok: Universitas Indonesia)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973 pada tanggal 5 September 1973

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 544/PDT.G/2017/PN.JKT.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 640/PDT/2018/PT.DKI

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT/2020

JURNAL NASIONAL:

Pancapuri, A. (2016), Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyuidikan Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 (Studi di Kantor Polisi Resort Kota Malang), Universitas Brawijaya

- Din, T., Mulyadi, L., & Narsudin, U.(2017), Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Autentik, Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum, 10 (2), hlm. 117-138.
- Wijayanto, A. (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4 (4), hlm. 791-798
- Aman, A. (2019). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan: Notaris, Rahasia Jabatan. Recital Review, 1(2), hlm. 59-71
- Fajriatul Tivani Haridhy, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019, hlm. 328.
- Yogi Kristrianto, “Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 201.
- Roza, D., Toni, G., (2021), Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica Vol. 18 Nomor 1, April 2021, hlm. 20-26

SOP PENULISAN

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Dan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. (Jakarta: FH UPH, 2022)

WEBSITE/ INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wawancara>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Putra Hutomo, Praktisi Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, dilakukan secara daring pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat

